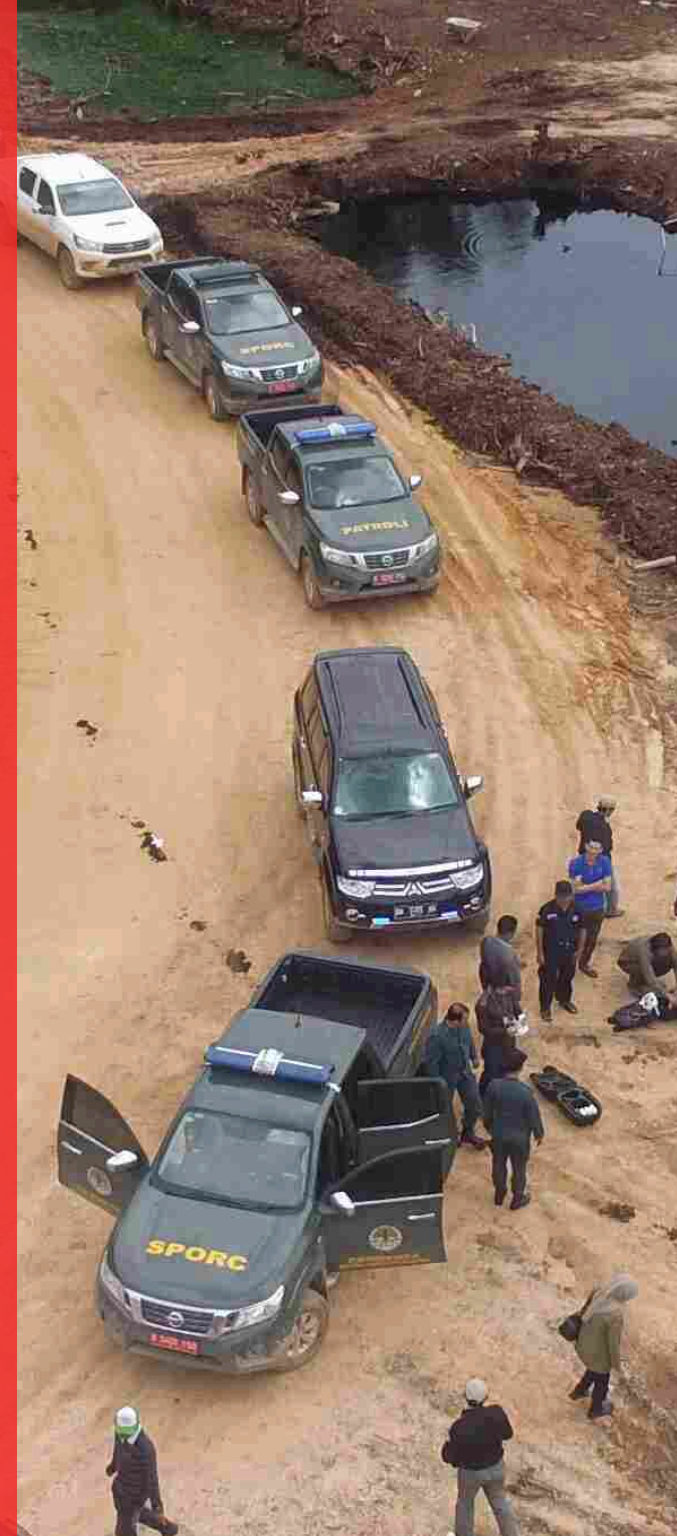


Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RENCANA KERJA 2017





PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017.

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berisi gambaran unit kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2017, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya di tahun 2017.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, Januari 2017
Sekertaris Direktorat Jenderal,
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ir. Kemal Amas, Msc
NIP.1959072519861003

DAFTAR ISI

Pendahuluan		i
Daftar Isi		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Kondisi Umum;	Hal. 1
	2. Kondisi Saat ini;	Hal. 2
BAB II	INDIKATOR KINERJA	
	1. Indikator Kinerja Kegiatan	Hal. 4
	2. Sasaran Kegiatan	Hal. 5
BAB III	STRATEGI PENCAPAIAN	
	1. Metode Pelaksanaan	Hal. 6
	2. Tahapan Pelaksanaan	Hal. 7
BAB IV	KERANGKA PENDANAAN	Hal.37
BAB V	PENUTUP	Hal.38
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Gambar. 1	Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2017;	Hal. 3
Gambar. 2	Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2017;	Hal. 5
Gambar. 3	Metode Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	Hal. 6
Gambar. 4	Indikator Kinerja Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Hal. 7
Gambar. 5	Prioritas Nasional Tahun 2017, Ditjen PHLHK	Hal. 10
Gambar. 6	Skema Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal. 36

Tabel.	1	Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK Tahun 2017	Hal. 9
Tabel.	2	Standarisasi Output lingkup Kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 2017	Hal.13
Tabel.	3	Standarisasi Komponen lingkup Kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 2017	Hal.14
Tabel.	4	Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	Hal.16
Tabel.	5	Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Hukum dan Kerjasama Teknis, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	Hal.18
Tabel.	6	Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	Hal.19
Tabel.	7	Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017	Hal.20
Tabel.	8	Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Layanan Perkantoran, Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2017, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 2017	Hal.21
Tabel.	9	Standar Biaya Masukan Teknis Operasional Tahun 2017, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Hal.23
Tabel	10	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan	Hal.25
Tabel	11	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasi Gabungan	Hal.26
Tabel	12	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Pelatihan Menembak	Hal.27
Tabel	13	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasional Kapal Badak Laut	Hal.28
Tabel	14	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hal.28
Tabel	15	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasi Yustisi (Penyidikan)	Hal.30
Tabel	16	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Pengumpulan Bahan dan Keterangan (UPT)	Hal.32
Tabel	17	Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Penanganan Bahan Bukti Tindak Pidana Kehutanan	Hal.33
Tabel	18	Skenario Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK TA 2017	Hal.37
Tabel	19	Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Program dan Evaluasi	Hal.40
Tabel	20	Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Hukum dan Kerjasama Teknis	Hal.42
Tabel	21	Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Hal.43
Tabel	22	Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Keuangan dan Umum	Hal.44
Tabel	23	Statistik Sumber Daya Manusia Ditjen PHLHK per 16 November 2016	Hal.45
Tabel	24	Statistik Data Pegawai Non Struktural Ditjen PHLHK berdasarkan Status Fungsional per 31 Desember 2016	Hal.46

BAB I PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Disebutkan bahwa Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Rencana Kerja Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan pentingnya upaya Unit Kerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan hukum telah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang

Rencana Strategis (Renstra) Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019. Upaya Kerja tersebut dituangkan salah satunya sebagai Rencana Kerja Unit Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong tercapainya target yang telah digariskan di dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran yang tercantum pada Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 2015-2019 dan Kementerian LHK Tahun 2015-2019. Proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK tahun 2017 ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal PHLHK, upaya-upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.



2. Kondisi Saat Ini

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2017 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kinerja yang dicapai pada Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PH LHK berjalan secara efektif dan efisien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Rencana Kerja Sekretariat

Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah Kerja dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (K5)

Didalam Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan Metode Pelaksanaan Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di Lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hldup dan Kehutanan, dan di Tahun 2017 SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai 75.

Saat ini ada beberapa isu yang menjadi fokus utama Setditjen Penegakan Hukum diantaranya pembentukan UPT Penegakan Hukum, Penerapan Revolusi Mental dan Pencapaian SAKIP dan Laporan Keuangan yang WTP. Untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap seluruh kegiatan Penegakan Hukum, maka isu-isu yang perlu segera diperbaiki melingkupi

- 1) Perencanaan program, anggaran dan evaluasi yang akuntabel;
- 2) Penyampaian data dan informasi baik untuk publik, DPR maupun internal KLHK yang akurat dan tepat waktu;
- 3) Perbaikan kelembagaan baik di pusat maupun UPT yang efektif dan efisien;
- 4) Penyelesaian Aspek hukum pelaksanaan penegakan hukum yang terpadu;
- 5) Pemenuhan sumber daya manusia yang berkompeten;
- 6) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,
- 7) Pengelolaan aset dan keuangan termasuk didalamnya pencatatan, pembukuan, pelaporan, penggunaan serta kondisinya yang lengkap dan transparan.



Gambar 1 Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2017



BAB II

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah dijabarkan dalam buku Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 telah selesai disusun, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis yang mengalir dari hulu hingga memberi dampak di hilir. Rencana strategis Sekretariat Direktorat telah dikemas menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang sudah ditetapkan pada Renstra Kementerian dan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agar rencana-rencana Sekretariat Direktorat ini dapat memberi pengaruh untuk mengenai sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, penyusunan rencana kerja 2016 ini dilakukan dengan secara hati-hati dan seksama agar aktivitas yang terselenggara mampu menunjang sasaran strategis dan sasaran program secara rasional dan logis.

Sehingga apa yang dilaksanakan benar-benar akan mampu membawa lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia ke arah yang positif. Untuk mencapai hal itu, upaya dalam penyusunan Rencana Kerja ini menggunakan metode perencanaan *logic model*. Logika yang ditunjukkan dengan metode perencanaan ini adalah dengan menggambarkan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan terlaksana dan mampu mencapai sasaran kegiatan tersebut, maka sasaran program yang ditetapkan mampu diperoleh hingga tercapainya sasaran strategis.

Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis sudah ditetapkan dalam penyusunan Rencana Strategi Kementerian untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mendukung terlaksananya kegiatan dan sasaran program tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut menetapkan sasaran unit kegiatan dan indikator-indikator yang sinergis dan tepat sasaran. Melanjutkan rencana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat perencanaan strategis untuk menetapkan sasaran elemen kegiatan dan indikator yang menopang dan membangun aktivitas pencapaian sasaran unit kegiatan.



KEGIATAN

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SASARAN KEGIATAN

Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan minimal 78.00 (A) di tahun 2019



Gambar 3 Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2017

Skema alur *logic model* mengenai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK dijelaskan pada Gambar 2.2. Sasaran dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK ialah bahwa reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus terwujud.

2. Sasaran Kegiatan

Melanjuti Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan, setiap unit kegiatan menyusun Sasaran dan Indikator Unit Kegiatan yang kontinu dengan Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan. Sama seperti perencanaan sebelumnya, dalam penyusunannya pun menggunakan metode perencanaan *logic model* untuk memastikan dalam pelaksanaannya berkesinambungan.

Untuk memastikan bahwa antara Unit Kegiatan memiliki rencana yang sejalan dengan Kegiatan yang telah ditentukan, maka Unit Kegiatan dalam Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dipastikan terlibat dan memiliki andil dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan. Pada Direktorat ini, terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi sasaran kegiatannya. Oleh karena itu, Unit Kegiatan yang memiliki andil dalam pencapaian tersebut antara lain Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, serta Unit Kegiatan Hukum dan Kerja Sama Teknis.

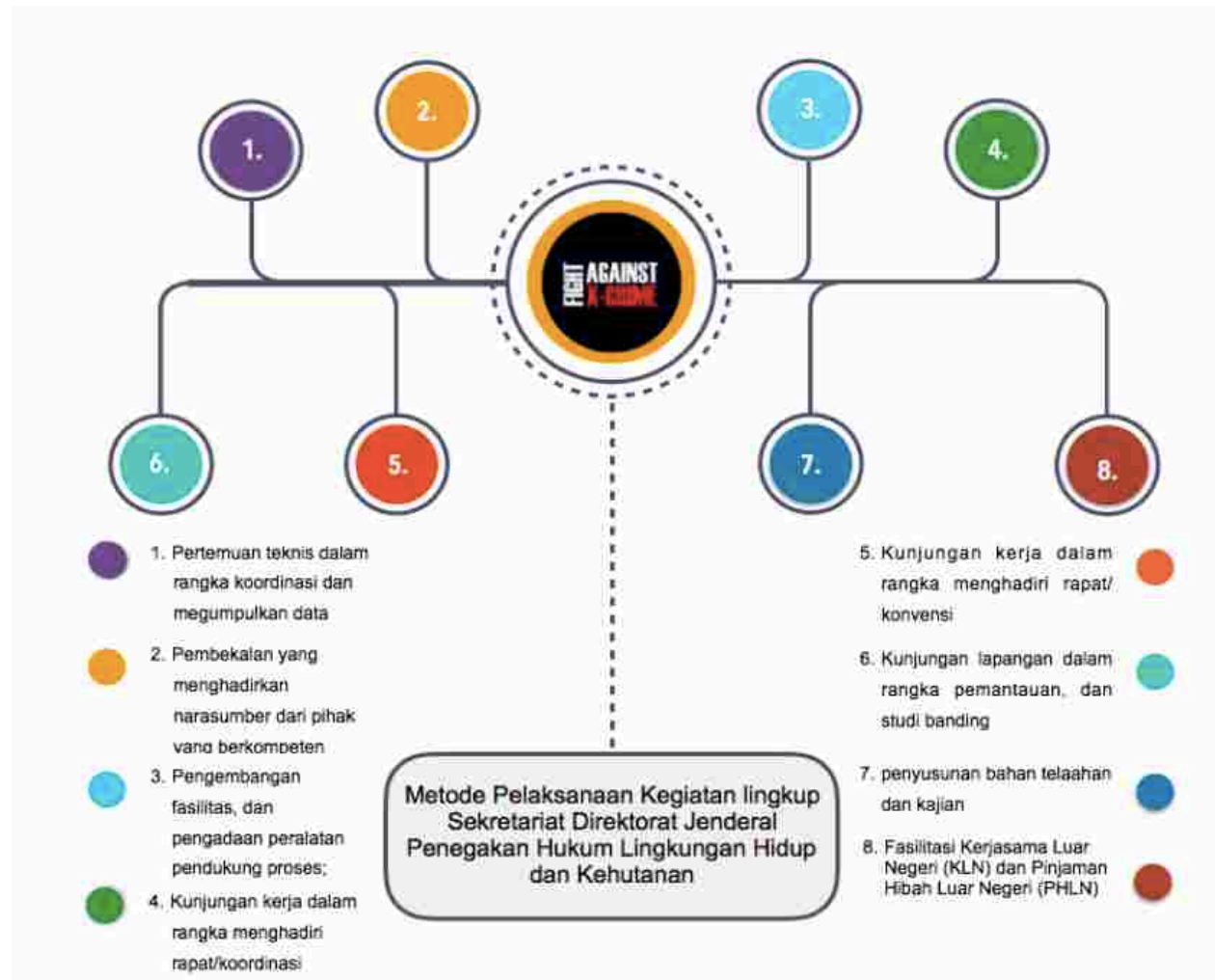
BAB III

STRATEGI PENCAPAIAN

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah kombinasi dari swakelola dan pelaksanaan oleh pihak ketiga dengan penyiapan beberapa metode pelaksanaan yang meliputi:



Gambar 3 Metode Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



2. Tahapan Pelaksanaan

Didalam tahapan pelaksanaan layanan dukungan manajemen Eselon I, untuk mencapai Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 75 Poin pada Tahun 2017, maka di butuhkan uraian Sasaran Unit Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di rangkum sesuai Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

Unit Kegiatan;

1. Program dan Evaluasi
2. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Keuangan dan Umum
4. Hukum dan Kerja Sama Teknik



Gambar 4 Indikator Kinerja Unit Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Renstra Ditjen PHLHK 2015-2019



A. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

1) Substansi dan Pendukung RKA

- a) Penyusunan RKA harus mematuhi alokasi pagu yang telah ditetapkan pada masing-masing satuan kerja. Alokasi anggaran yang harus sesuai adalah jumlah alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan), jumlah alokasi belanja operasional layanan perkantoran (komponen 002), jumlah alokasi persumber dana (RM, PNBP, PHLN, PHDN, dan RMP), serta jumlah total pagu anggaran per satuan kerja. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh penyusun RKA, maka akan dilakukan penyesuaian (pengurangan pagu, penggeseran, dan penghapusan) tanpa memperhatikan kondisi aktual pada masing-masing satuan kerja.
- b) Setiap rencana kegiatan agar dilengkapi dengan kerangka acuan kerja (KAK)/ *Term of reference (ToR)* dan RAB.
- c) Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output kegiatan yang akan dihasilkan dan alokasi anggarannya dalam RKA, diutamakan merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan target prioritas nasional yang tercantum dalam RKP
- d) Output layanan perkantoran hanya terdiri dari komponen 001 (gaji dan tunjangan) serta komponen 002 (operasional perkantoran).
- e) Alokasi belanja pegawai, barang operasional dan modal harus menggunakan alokasi anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni (RM).
- f) Arahan *flat policy* dari Kementerian Keuangan menyebabkan penggunaan alokasi anggaran untuk komponen 002 terbatas dan cenderung kurang terpenuhi. Atas kebijakan tersebut, setiap satuan kerja harus cermat mengalokasikan detail belanja sesuai dengan kebutuhan nyata, yang didukung dengan data dan informasi pegawai dan aset tetap yang membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan.
- g) Pada output Layanan Internal (Overhead), terdapat alokasi anggaran 'Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit'. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan dan menampung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen secara teknis dan spesifik selain uraian yang telah ditetapkan dalam komponen layanan perkantoran. Alokasi anggaran tersebut Harus digunakan untuk kepentingan output kepegawaian, keuangan, program, serta evaluasi dan pelaporan. Dengan demikian komponen dan detail belanja untuk keperluan dukungan administrasi tidak lagi di input ke dalam komponen 002 (layanan perkantoran) maupun dalam komponen kegiatan teknis.
- h) Usulan anggaran satker lingkup Ditjen PHLHK harus berpedoman pada:
 - i) Standar Biaya Masukan tahun 2017 yang diterbitkan Menteri Keuangan
 - j) Pedoman Standar Biaya KLHK tahun 2017
 - k) Bagan Akun Standar
 - l) Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen PHLHK
- m) Untuk biaya masukan yang belum tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan, maka PA/KPA yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan, wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa PA/KPA bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA diluar standar biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2) Pagu Anggaran Tahun 2017

Sesuai surat bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Ditjen PHLHK memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp235.719.413.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1 Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PHLHK Tahun 2017

NO	PAGU	RM			B. Barang Non Ops PNBP	JUMLAH
		B.Pegawai	B. Barang			
			Ops	Non Ops		
1	Pagu Indikatif	109.141.290	14.000.000	78.172.418	40.527.282	241.840.990
2	Pagu Anggaran	109.141.290	14.000.000	78.172.418	40.527.282	241.840.990
3	Pagu Alokasi Anggaran	109.141.290	14.000.000	74.140.912	38.437.211	235.719.413

Komposisi pagu anggaran Direktorat Jenderal PHLHK tahun 2017 berdasarkan jenis belanja dan sumber dana terdiri atas:

- Belanja pegawai (RM) = Rp 109.141.290,- (46,30%)
- Belanja barang operasional (RM) = Rp 14.000.000,- (5,94%)
- Belanja barang non operasional (RM) = Rp 74.140.912,- (31,45%)
- Belanja barang non operasional (PNBP) = Rp 38.437.211,- (16,31%)



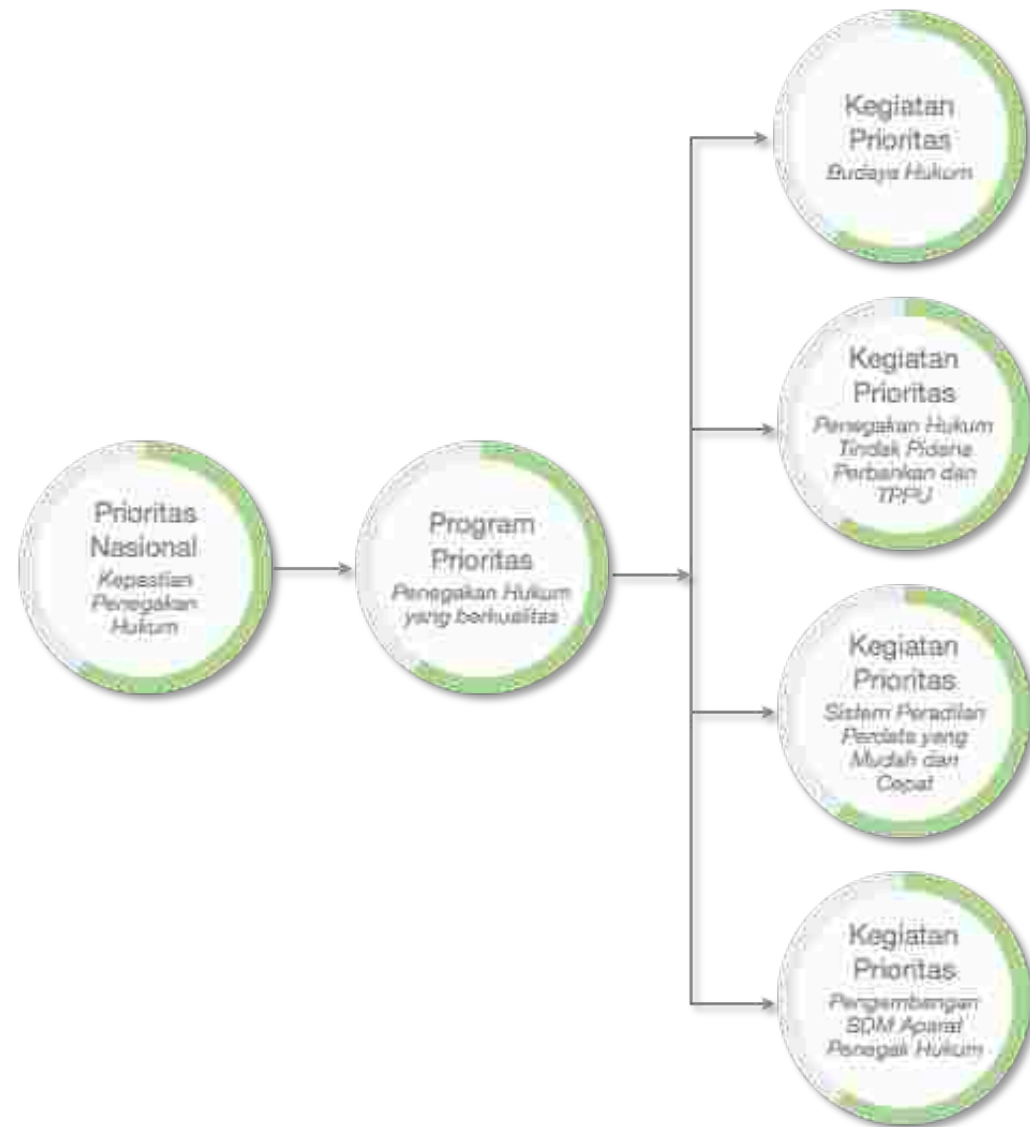
3) Prioritas Alokasi Penganggaran

Hal-hal yang menjadi prioritas dalam pengalokasian anggaran yaitu:

Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional organisasi yang sifatnya mendasar seperti alokasi belanja gaji, uang makan dan tunjangan pegawai serta biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi : keperluan sehari-hari perkantoran, honor pengelola keuangan, biaya langganan daya dan jasa, biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, honor tenaga non PNS.

Kegiatan teknis sesuai dengan prioritas nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2017 yang meliputi kegiatan:

- a) Pencegahan dan Pengamanan Hutan
- b) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
- c) Penanganan Pengaduan dan Sanksi Administrasi
- d) Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan



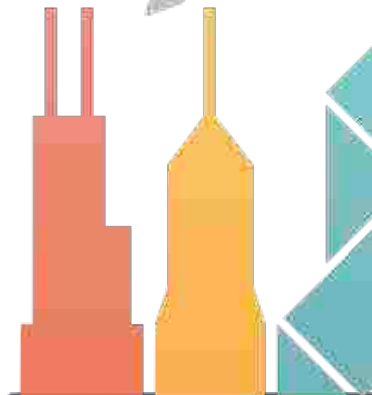
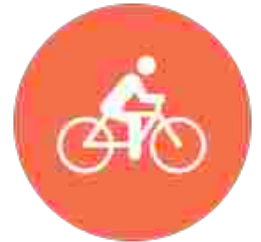
Gambar 5 Prioritas Nasional Ditjen Penegakan Hukum LHK TA 2017



4) Pembatasan Alokasi Anggaran dalam RKA

Hal-hal yang dibatasi dalam usulan anggaran, yaitu:

- a) Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak menunjang langsung pelaksanaan tupoksi;
- b) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali untuk:
 - Kendaraan operasional roda dua dan empat untuk petugas lapangan
 - Pengadaan kendaraan bermotor untuk satker baru yang sudah ada ketetapan Menteri PAN-RB dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia
 - Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat sehingga secara teknis tidak layak dimanfaatkan lagi. Biaya pemeliharaan kendaraan yang rusak berat memerlukan biaya pemeliharaan yang sangat besar selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak diperbolehkan lagi dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung dengan berita acara penghapusan/ pelelangan)
- c) Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya dan sejenisnya dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin;
- d) Perjalanan dinas luar negeri;
- e) Kegiatan study banding/pembinaan pegawai yang tidak secara langsung menunjang upaya pencapaian output;



**FIGHT AGAINST
X-CRIME**





5) Penerapan Standar Biaya

Dalam penyusunan usulan anggaran tahun 2017, harus mengikuti standar biaya yaitu:

- Standar Biaya Masukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK.33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
- Standar Biaya Kegiatan KLHK sesuai dengan P.8/Setjen/Rokeu/Keu.1/ 8/2016 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Standar Biaya Teknis Operasional Tahun 2017 Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017;



6) Standarisasi Output

Tabel 2 Standarisasi Output lingkup Kegiatan Ditjen PHLHK Tahun 2017

Kode	Kegiatan
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK
5427.001	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PHLHK
5428	Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan
5428.001	Luas hutan yang di amankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan
5428.002	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi
5428.003	Jumlah Polisi Hutan yang di bina dan ditingkatkan Kapasitasnya
5428.004	Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum
5429	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
5429.001	Pendaftaran dan Penyelesaian Gugatan Perdata Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan
5429.002	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan diluar pengadilan yang telah diverifikasi
5430	Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan
5430.001	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti
5430.002	Penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
5430.003	Sanksi administrasi yang ditaat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan meningkat setiap tahun
5430.004	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya
5430.005	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum
5431	Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5431.001	Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diselesaikan (P21)
5431.002	Verifikasi Perkara Bidang Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5431.003	Barang Bukti yang di tangani sesuai dengan jumlah kasus yang ditangani
5431.004	Fasilitasi Penanganan Kasus
5431.005	Pelaksanaan Eksaminasi Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5431.006	Jumlah PPNS yang di bina dan tingkatkan kapasitasnya sebanyak 500 Orang

7) Standarisasi Komponen

Tabel 3 Standarisasi Komponen Kegiatan lingkup Ditjen PHLHK

Kode	Keterangan
5427.001	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5427.001 .051	Penyusunan Dokumen Perencanaan
5427.001 .052	Penyusunan Dokumen Anggaran
5427.951	Layanan Internal (Overhead)
5427.951.007	Peralatan dan Mesin
5427.951.008	Gedung dan Bangunan
5427.951.009	Data dan Informasi
5427.994	Layanan Perkantoran
5427.994.001	Gaji dan Tunjangan
5427.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
5428.001	Luas hutan yang di amankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan
5428.001.001	Pengumpulan data dan informasi ancaman dan gangguan keamanan bidang kehutanan
5428.001.002	Monitoring dan evaluasi ancaman dan gangguan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan
5428.002	Jumlah lokasi dilaksanakannya pencegahan serta pengendalian ancaman dan gangguan melalui kegiatan sosialisasi, patroli dan operasi
5428.002.001	Penyusunan program dan rencana kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan
5428.002.002	Penguatan koordinasi dan kerjasama pencegahan dan pengamanan hutan
5428.002.003	Pengendalian pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan
5428.002.004	Jumlah Polisi Hutan yang di bina dan ditingkatkan Kapasitasnya
5428.003.001	Peningkatan kapasitas polisi kehutanan
5428.004.001	Jumlah Sarana Prasarana Pelaksanaan Pengawasan, Pengamanan dan Penegakan Hukum yang memenuhi standar minimum
5428.004.002	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan
5428.004.003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengamanan hutan
5431.951	Layanan Internal (Overhead)
5431.951.005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
5431.951.007	Peralatan dan Mesin
5431.951.008	Gedung dan Bangunan
5431.951.009	Data dan Informasi



8) Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung merupakan salah satu syarat proses penelaahan RKA, baik penelaahan RKA berdasarkan pagu anggaran maupun penelaahan RKA berdasarkan pagu alokasi anggaran. Dokumen pendukung merupakan hal yang penting dalam pengalokasian anggaran untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan berbasis kinerja. Dokumen ini diperlukan dalam hal jenis dan standar alokasi pembiayaan suatu detail belanja tidak termuat dalam SBM dan SBK yang ditetapkan Menteri Keuangan.

- 1) Kerangka Acuan Kerja / *Term of Reference* (KAK/ToR)
 - a) KAK/ToR disusun untuk setiap output kegiatan (format terlampir).
- 2) Rincian Anggaran Belanja (RAB)
 - a) Dokumen RAB merupakan dokumen pendukung KAK/ToR, dokumen ini menjelaskan besaran total biaya tiap komponen yang merupakan tahapan untuk mencapai output kegiatan.

Untuk menghindari terjadinya pemblokiran anggaran, beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Apabila satker mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin seperti pembelian komputer, printer, kendaraan roda 2/4/6 dan sejenisnya maka harus dilengkapi dengan daftar harga dan spesifikasi peralatan/mesin/kendaraan yang akan dibeli serta daftar BMN yang dapat menerangkan jumlah kendaraan yang tersedia saat ini pada satuan kerja dan kondisinya.
- b) Untuk keperluan pengadaan tanah, diperlukan dokumen pendukung berupa SPTJM, KAK, RAB, daftar analisa kebutuhan, daftar BMN satuan kerja, referensi NJOP di sekitar calon lokasi tanah yang akan diadakan, surat keterangan harga pasaran tanah di wilayah kecamatan setempat dari kepala wilayah kecamatan, referensi sertifikat tanah yang akan dibeli (apabila memungkinkan), gambar/denah/peta lokasi tanah, serta data dan informasi pendukung lainnya.
- c) Alokasi anggaran untuk kepentingan pembangunan gedung/bangunan dan sejenisnya agar dilengkapi dengan SPTJM, KAK, RAB, daftar analisa kebutuhan gedung/bangunan, daftar BMN, surat pernyataan telah tersedianya lahan, surat keterangan bebas sengketa lahan, gambar teknis dan rincian pembiayaan pembangunan yang disahkan oleh konsultan perencana dan kepala satuan kerja, spesifikasi teknis dari dinas yang menangani urusan pekerjaan umum, serta data dan informasi pendukung lainnya.
- d) Alokasi anggaran untuk keperluan rehabilitasi/perbaikan gedung/bangunan agar dilengkapi dengan SPTJM, KAK, RAB, surat keterangan dari dinas yang menangani urusan pekerjaan umum di daerah, yang menyatakan bahwa bangunan/gedung tersebut memerlukan perbaikan/rehabilitasi. Surat keterangan dilampiri dengan hasil penilaian teknis kondisi gedung/bangunan. Data pendukung lain untuk keperluan rehabilitasi/perbaikan gedung/bangunan adalah berupa gambar kondisi gedung/bangunan yang diketahui oleh kepala satuan kerja, serta analisa harga dan gambar teknis.



Tabel 4 Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Program dan Evaluasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen
	uraian
SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN	
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan
A	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2018
B	Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2018
C	Rapat Kerja Bidang PHLHK Tahun 2017
D	Kelompok Kerja Perencanaan Anggaran Ditjen PHLHK
052	Penyusunan Dokumen Anggaran
A	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK
B	Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2018
C	Sosialisasi Juknis Anggaran dan SKB bidang PHLHK
D	Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK
E	Pemantapan Penyusunan RKA K/L Ditjen PHLHK TA 2018
F	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG)
G	Penelaahan/Reviu Revisi Anggaran bidang Penegakan Hukum LHK TA 2017
H	Rapat Kerja bersama DPR RI dan Instansi/Pihak terkait



SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI

053	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan
A	Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja PHLHK
B	Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PHLHK Tahun 2016
C	Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK
D	Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC
F	Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2016
G	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK TA 2017
H	Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016
054	Penyusunan Data dan Informasi
A	Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2016
B	Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum
C	Pelatihan Pengelolaan Operasional Room
D	Pengujian Data dan Analisis Lapangan
E	Sinkronisasi dan Koordinasi Opetor Opsroom
F	Pelaporan dan Analisa Data PHLHK
G	Pelaporan/Telaahan Tematik
H	Pengembangan Sistem Opsroom
I	Koordinasi Pengembangan Sistem Opsroom
J	Data Mining Sosial Media
K	Penyebarnya Informasi Bidang PHLHK
L	Pameran Penegakan Hukum LHK
M	Maintenance Aplikasi dan Publikasi Penegakan Hukum LHK



Tabel 5 Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Hukum dan Kerjasama Teknis, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen
	uraian
	SUB BAGIAN KERJASAMA TEKNIS
055	Kemitraan dan Kerjasama Dalam Negeri
A	Penyusunan Kerjasama dalam negeri
056	Penyusunan Kerjasama Luar Negeri
A	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri
	SUB BAGIAN HUKUM
057	Penyusunan Rancangan Perundang-undangan
B	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
D	Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan



Tabel 6 Arsitektur Data Informasi dan Kinerja, Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2017

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen
	uraian
SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
058	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
A	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK
B	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional lingkup Ditjen PHLHK
C	Evaluasi Kinerja Pegawai
SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
059	Penyusunan Organisasi Tata Laksana
A	Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK
B	Pembahasan Tata Hubungan Kerja BPPH LHK
C	Penyusunan Anjab dan Evajab
D	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
060	Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait
A	Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK
B	Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Ditjen PHLHK
C	Peningkatan Kapasitas Pegawai Ditjen PHLHK



Tabel 7 Arsitektur Data Informasi dan Kinerja Unit Kegiatan Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK TA 2017

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	
Kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen
	uraian
SUB BAGIAN KEUANGAN	
061	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
A	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2016
B	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017
C	Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker
D	Monitoring dan evaluasi administrasi Kegiatan Satuan Kerja Setditjen GAKKUM
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN	
062	Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan
A	Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum
B	Pemutakhiran data Barang Milik Negara
C	Bimtek dan Pembinaan Pengelola BMN
D	Penyusunan Laporan BMN Ditjen Gakum Semester II 2016
E	Penyusunan Laporan BMN Ditjen GAKum Semester I Tahun 2017
SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN DAN UMUM	
063	Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum
A	Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas
B	Penataan Arsip Surat lingkup Setditjen PHLHK
C	Evaluasi Tata Naskah Dinas lingkup Ditjen PHLHK
D	Administrasi Layanan Operasional Pimpinan



Tabel 8 Arsitektur Data Informasi dan Kinerja, Layanan Perkantoran, Kendaraan Bermotor, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2017

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen
	uraian
5427.951	Layanan Perkantoran [Base Line]
007	Peralatan dan Mesin
A	Pengadaan perlengkapan kantor Ditjen GAKKUM LHK
B	Operation room
C	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2
009	Data dan Informasi
A	Pengadaan Peralatan Kantor
B	Pengadaan Aplikasi Keuangan GAKKUM
5427.994	Layanan Perkantoran
001	Gaji dan Tunjangan
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
A	Keperluan sehari-hari perkantoran
B	Langganan daya dan jasa
C	Biaya Pemeliharaan
D	Biaya terkait Operasional Satuan Kerja

**B. Standar Biaya Masukan Teknis Operasional;**

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Biaya Masukan Teknis Operasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam melaksanakan kegiatan perlu Standar Biaya Masukan Teknis Operasional yang belum diatur dalam Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan maka Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Teknis Operasional Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan :

- a. Memberikan pedoman dan petunjuk penyusunan rencana kerja dan anggaran serta menentukan harga standar biaya masukan lain teknis operasional;
- b. Melakukan prosedur pertanggungjawaban kegiatan dan pengujian keuangan standar biaya teknis operasional;

Tabel 9 Standar Biaya Masukan Teknis Operasional Tahun 2017 Kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Satuan	Harga Satuan
1	Biaya Komando dan Pengendalian	PAKET KEGIATAN	25,000,000
2	Biaya Pembina/Pengendali SPORC	OB	600,000
3	Biaya Insentif Anggota SPORC	OB	400,000
4	Biaya Honorarium Nahkoda	OB	6,500,000
5	Biaya Honorarium KKM	OB	6,000,000
6	Biaya Honorarium Komandan Kapal	OB	1,750,000
7	Biaya Honorarium Juru Masak	OB	1,800,000
8	Biaya Insentif ABK Kapal Badak Laut	OB	1,500,000
9	Biaya Bahan Makanan Basah dan Kering	OH	30,000
10	Biaya Intelijen/Penggalan Data dan Informasi	KALI	4,000,000
11	Biaya Sewa Alat Berat	PAKET	35,000,000
12	Biaya Sewa Alat Logistik	PAKET/HARI	4,000,000
13	Biaya Tambat dan Pandu Kapal di Lokasi Patroli	PAKET	7,000,000
14	Biaya Angkut Bahan Bakar Antar Kapal	LITER	500
15	Biaya Tambat Kapal Badak Laut	PAKET	90,000,000
16	Biaya Doking Kapal Badak	PAKET/TAHUN	100,000,000
17	Biaya Pemeliharaan/Perawatan Kapal	PAKET/TAHUN	60,000,000
18	Biaya Tambat Kapal Badak Laut Kondisi Tertentu	PAKET	35,000,000
19	Sewa Kapal Penarik Barang Bukti	UNIT	50,000,000
20	Biaya Pemeliharaan Barang Bukti TSL	BULAN	5,000,000
21	Sewa Tempat Penitipan Barang Bukti	PAKET	10,000,000
22	Penjagaan Barang Bukti	OH	250,000
23	Biaya Analisa Laboratorium (Cair)	PAKET	5,000,000
24	Biaya Analisa Laboratorium (Padat)	PAKET	4,500,000
25	Biaya Analisa Udara	PAKET	7,500,000
26	Biaya Analisa Pengukuran Sebaran Lahan/Tanah yang Tercemar/Rusak/Emis	PAKET	7,500,000
27	Biaya Medis Penanganan Barang Bukti TSL	OK	500,000
28	Biaya Pengurusan Administrasi Senjata Api	PUCUK	1,850,000
29	Biaya Pelatihan Menembak	OK	3,000,000
30	Biaya Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	ORANG	3,500,000
31	Biaya Psikotes Pemegang Senjata Api	ORANG	800,000
32	Biaya Penggandaan Buku Pas Senjata Api	BUKU	500,000
33	Biaya Perlengkapan Lapangan (Seragam, Rompi, Sepatu, Topi dan Kacamata dan perlengkapan lainnya)	PER ORANG	6,000,000
34	Biaya Pembuatan Papan Peringatan/Informasi	UNIT	2,500,000
35	Biaya Pengadaan PPNS/PPLH Line	ROLL	1,750,000



C. Standar Kegiatan dan Biaya (SKB);

Untuk menerapkan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang berpedoman pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), serta Penganggaran Terpadu, salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah standar biaya oleh karena itu penganggaran Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerlukan standar kegiatan dan biaya yang digunakan sebagai referensi untuk penyusunan anggaran, penyusunan perkiraan maju dan penyusunan pagu indikatif tahun berikutnya, serta menjadi referensi teknis pelaksanaan kegiatan dan anggarannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017. Standar Kegiatan dan Biaya Penegakan Hukum LHK Adalah standar kegiatan dan biaya bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2017 dan selanjutnya disebut sebagai SKB bidang PHLHK tahun adalah standar kegiatan dan biaya yang ditetapkan untuk mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan secara seragam, teratur dan terukur bagi satuan kerja unit pelaksana teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal PHLHK TA 2017

SKB Bidang PHLHK Tahun 2017 berfungsi sebagai Acuan penyusunan anggaran, Acuan pencermatan, penelitian, dan reviu RKA, Acuan tahapan pelaksanaan kegiatan, Acuan perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun yang akan datang; serta dan Alat pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Penggunaan SKB Bidang PHLHK Tahun 2017 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya dapat dibayarkan apabila tersedia alokasi anggaran dalam DIPA instansi yang bersangkutan;
- Indeks biaya sebagaimana tercantum dalam SKB berlaku sebagai estimasi yang dapat dilampaui sesuai harga pasar setempat atau standar harga regional sepanjang tersedia alokasi anggarannya;
- Standar biaya yang bersifat umum berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2017 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Harga satuan biaya standar kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini disusun dengan mengambil contoh di Provinsi Jawa Timur sedangkan untuk provinsi lainnya agar disesuaikan.
- Penerapan SKB sebagai Sub Komponen pada masing-masing satuan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan tipologi masing-masing.



Tabel 10 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasi Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan

STANDAR SATUAN:

Waktu : 10 Hari (efektif di lapangan)
Pelaksana : 10 Orang
Target : 1 Target Operasi

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Operasi
1 Operasi : Rp 80,900,000

KODE: PHLHK-01

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- ATK	1	KEG	2,000,000	2,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Konsumsi rapat persiapan	20	OK	60,000	1,200,000	- Sesuai PSBK
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Biaya Komando dan Pengendalian	1	PKT KEG	25,000,000	25,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	- Biaya Komunikasi	1	KEG	500,000	500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
2	PELAKSANAAN					
	524111 Belanja perjalanan biasa					
	- Uang Harian (10 org x 10 hari)	100	OH	360,000	36,000,000	- Sesuai PSBK
	- Sewa kendaraan tim operasi	10	HARI	700,000	7,000,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Transportasi ke lokasi	10	OT	500,000	5,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan memungkinkan MAK lain sebagai contoh pembelian bahan bakar (521219) atau sewa kendaraan (522141).
3	PEMBAHASAN dan PENYELESAIAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Konsumsi rapat evaluasi	20	OK	60,000	1,200,000	- Sesuai PSBK
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	1	KEG	3,000,000	3,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				80,900,000	
	VOLUME				1 Operasi	
	INDEKS BIAYA				80,900,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016
PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016



Tabel 11 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasi Gabungan

STANDAR SATUAN:

Waktu : 5 Hari (efektif dilapangan)
Pelaksana : 30 Orang
Target : 1 Kali

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Operasi
1 Operasi : Rp 128,300,000

KODE: PHLHK-02

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2,500,000	2,500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Konsumsi Rapat Persiapan, penyusunan Renop	40	OK	60,000	2,400,000	- Sesuai SBM/PSBK
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Biaya Komando dan Pengendalian	1	PKT KEG	25,000,000	25,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Biaya Komunikasi	1	KEG	1,000,000	1,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
2	PELAKSANAAN					
	522141 Belanja Sewa					
	- Sewa alat berat	1	KEG	20,000,000	20,000,000	- Hanya digunakan pada operasi perambahan
	- Sewa kendaraan alat angkut barang bukti	1	HARI	3,000,000	3,000,000	- Sesuai SBM/PSBK
	524111 Belanja perjalanan biasa					
	- Mobilisasi tim	1	KEG	2,000,000	2,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	- Uang Harian (30 org x 5 hari)	150	OH	360,000	54,000,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Transportasi ke lokasi	30	OT	500,000	15,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan memungkinkan MAK lain sebagai contoh pembelian bahan bakar (521219) atau sewa kendaraan (522141).
3	PEMBAHASAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat Pembahasan Hasil (40 org x 1 hari)	40	OK	60,000	2,400,000	- Sesuai SBM/PSBK
4	PENYELESAIAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	1	KEG	1,000,000	1,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				128,300,000	
	VOLUME				1 Operasi	
	INDEKS BIAYA				128,300,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016
PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016



Tabel 12 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Pelatihan Menembak

STANDAR SATUAN:

Waktu : 2 Hari
Pelaksana : 3 orang Panitia, 5 Orang Instruktur
Peserta : 30 Orang
Target : 1 Angkatan

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Angkatan
1 Angkatan : Rp 91,170,000

KODE: PHLHK-03

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2,000,000	2,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Sertifikat Menembak (30 Org x 1 Angkt)	30	ORG	15,000	450,000	
	- Alin Alongin (30 org x 1 Angkt)	30	ORG	500,000	15,000,000	
	521812 Belanja Barang Persediaan Amunisi					
	- Amunisi senjata laras pendek (990 x 1 Angkt)	990	BTR	15,000	14,850,000	
	- Amunisi senjata laras panjang (990 x 1 Angkt)	990	BTR	13,000	12,870,000	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Administrasi (30 org x 1 Angkt)	30	ORG	50,000	1,500,000	
2	PELAKSANAAN					
	522141 Belanja Sewa					
	- Sewa Lapangan Tembak	1	ANGKT	4,500,000	4,500,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	521213 Honor Output Kegiatan					
	- Honor Panitia (3 org x 1 Angkt)	3	OK	300,000	900,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Honor Instruktur (5 instruktur x 8 JPL x 2 hari)	80	JPL	150,000	12,000,000	
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Uang Saku Peserta (60 OH x 1 Angkt)	60	OH	110,000	6,600,000	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					
	- Akomodasi dan Konsumsi (60 OH x 1 Angkt)	60	OH	250,000	15,000,000	
	- Biaya Transportasi peserta (30 OH x 1 Angkt)	30	OJ	150,000	4,500,000	- Sesuai SBM/PSBK
3	PEMBAHASAN dan PENYELESAIAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	1	KEG	1,000,000	1,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				91,170,000	
	VOLUME				1 Angkatan	
	INDEKS BIAYA				91,170,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016
PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016



Tabel 13 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasional Kapal Badak Laut

STANDAR SATUAN:

Waktu : 12 Bulan
Pelaksana : 8 Orang
Target : 1 Unit Kapal Badak Laut

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Unit
1 Unit : Rp 940,360,000

KODE: PHLHK-04

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PELAKSANAAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Bahan bakar penggerak utama	1	THN	100,000,000	100,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Bahan bakar genset	1	THN	40,000,000	40,000,000	
	- Bahan bakar skoci	1	THN	12,000,000	12,000,000	
	- Pelumas	1	THN	40,000,000	40,000,000	
	- Air bersih	1	THN	15,000,000	15,000,000	
	- Bahan makan basah dan kering	2880	OH	30,000	86,400,000	
	521213 Honor Output Kegiatan					
	- Biaya Honorarium Nahkoda	12	OB	6,500,000	78,000,000	- Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	- Biaya Honorarium KKM	12	OB	6,000,000	72,000,000	Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	- Biaya Honorarium Juru Masak	12	OB	3,080,000	36,960,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Insentif Komandan Kapal	12	OB	1,750,000	21,000,000	- Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	- Insentif ABK Kapal Badak Laut	96	OB	1,500,000	144,000,000	Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	522141 Belanja Sewa					
	- Biaya tambat kapal	1	THN	90,000,000	90,000,000	- Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	- Biaya tambat kapal keadaan darurat	1	THN	35,000,000	35,000,000	- Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
	- Biaya docking kapal	1	THN	170,000,000	170,000,000	- Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	TOTAL BIAYA				940,360,000	
	VOLUME				1 Unit	
	INDEKS BIAYA				940,360,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016
PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016



Tabel 14 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Verifikasi Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan

STANDAR SATUAN:

Waktu : 4 Hari
Pelaksana : 2 Orang
Target : 1 Kasus

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Kegiatan
1 Kegiatan : Rp 23,880,000

KODE: PHLHK-05

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	KEG	500,000	500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
2	PELAKSANAAN					
	524111 Belanja perjalanan biasa					
	- Uang harian (2 org x 4 hari)	8	OH	410,000	3,280,000	- Sesuai SBM (Prop. Jawa Timur)
	- Biaya transportasi	2	OT	4,500,000	9,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan memungkinkan MAK lain sebagai contoh pembelian bahan bakar (521219)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Analisa Laboratorium (Cair)	1	PKT	2,500,000	2,500,000	- Sesuai kebutuhan dan standar biaya teknis PHLHK
	- Analisa Laboratorium (Padat)	1	PKT	7,500,000	7,500,000	- Sesuai kebutuhan dan standar biaya teknis PHLHK
3	PEMBAHASAN DAN PENYELESAIAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat Pembahasan Hasil (10 org x 1 hari)	10	OH	60,000	600,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	1	Keg	500,000	500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				23,880,000	
	VOLUME				1 Kegiatan	
	INDEKS BIAYA				23,880,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016

PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016



Tabel 15 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Operasi Yustisi (Penyidikan)

STANDAR SATUAN:

Waktu : 15 hari
Penyidik : 5 Orang
Target : 1 Kasus

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Operasi
1 Operasi : Rp 97,700,000

KODE: PHLHK-06

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	PKT	2,000,000	2,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Konsumsi Rapat Persiapan	20	OH	60,000	1,200,000	- Sesuai SBM/PSBK
2	PELAKSANAAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Biaya Komunikasi	1	PKT	500,000	500,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	- Biaya Konsumsi Tahanan	120	OH	60,000	7,200,000	- Sesuai SBM/PSBK
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Biaya koordinasi dan pengendalian (Kodal)	1	PKT KEG	25,000,000	25,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	- Biaya Pemeriksaan Kesehatan Tersangka	1	PKT	500,000	500,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	- Biaya Pengawasan Tersangka	12	OH	150,000	1,800,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	522151 Belanja Jasa Profesi					
	- Honorarium ahli / narasumber	6	OJ	1,800,000	10,800,000	- Sesuai SBM/PSBK dengan memperhatikan Jabatan/Golongan
	524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota					
	- Uang harian penyidik (5 org x 15 hari)	75	OH	160,000	12,000,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Uang harian petugas pengukur dan penguji kayu (hsl hutan) (2 org x 5 hari)	10	OH	160,000	1,600,000	- Sesuai SBM/PSBK



	- Uang harian petugas perpetaan (2 org x 5 hari)	10	OH	160,000	1,600,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Uang harian pengenalan jenis (1 org x 5 hari)	5	OH	160,000	800,000	- Sesuai SBM/PSBK
	- Sewa kendaraan (2 unit x 15 hari)	30	Hari	700,000	21,000,000	- Sesuai SBM/PSBK
524111	Belanja Perjalanan biasa					
	- Transportasi Saksi / Ahli	6	OK	1,000,000	6,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan memungkinkan MAK lain sebagai c/o pembelian bahan bakar (521219) atau sewa kendaraan (522141).
	- Penginapan Saksi / Ahli /	6	OH	500,000	3,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
3	PEMBAHASAN					
521211	Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat Pembahasan Hasil (20 org x 1 hari)	20	OH	60,000	1,200,000	- Sesuai SBM/PSBK
4	PENYELESAIAN					
521211	Belanja Bahan					
	- Pemberkasan	1	KEG	1,500,000	1,500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				97,700,000	
	VOLUME				1 Kasus	
	INDEKS BIAYA				97,700,000	

Standar Biaya Masukan PMK No

Ket : SBM : 33/PMK.02/2016

PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016



Tabel 16 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Pengumpulan Bahan dan Keterangan (UPT)

STANDAR SATUAN:

Waktu : 5 Hari
Pelaksana : 3 Orang
Target : 1 Kasus

PENGHITUNGAN INDEX:

Volume Satuan : 1 Pulbaket
1 Pulbaket : Rp 16,600,000

KODE: PHLHK-07

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2,000,000	2,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Konsumsi Rapat Persiapan (10 org x 1 hari)	10	OH	60,000	600,000	- Sesuai SBM/PSBK
2	PELAKSANAAN					
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Penggalan data dan informasi	1	Kali	4,000,000	4,000,000	Sesuai standar biaya teknis PHLHK
	524113 Belanja perjalanan dinas dalam kota					
	- Uang harian (3org x 5 hari)	15	OH	160,000	2,400,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan dimungkinkan menggunakan MAK 524113 apabila tidak memenuhi kriteria penggunaan MAK 524111
	- Transportasi dan akomodasi	3	OT	1,000,000	3,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan memungkinkan MAK lain sebagai contoh pembelian bahan bakar (521219) atau sewa kendaraan (522141).
	- Sewa kendaraan untuk tim pulbaket	5	HARI	700,000	3,500,000	- Sesuai SBM/PSBK
3	PEMBAHASAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Konsumsi Rapat Pembahasan Hasil (10 org x 1 hari)	10	OH	60,000	600,000	- Sesuai SBM/PSBK
4	PENYELESAIAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	1	Keg	500,000	500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				16,600,000	
	VOLUME				1 Pulbaket	
	INDEKS BIAYA				16,600,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016
PSBK : Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016

Tabel 17 Rincian Standar Kegiatan (SKB) bidang PHLHK TA 2017, Penanganan Bahan Bukti Tindak Pidana Kehutanan (TIPIHUT)

STANDAR SATUAN:

Waktu : 20 Hari
Pelaksana : 5 Orang
Target : 1 Paket BB

KODE: PHLHK-08

PENGHITUNGAN INDEX:

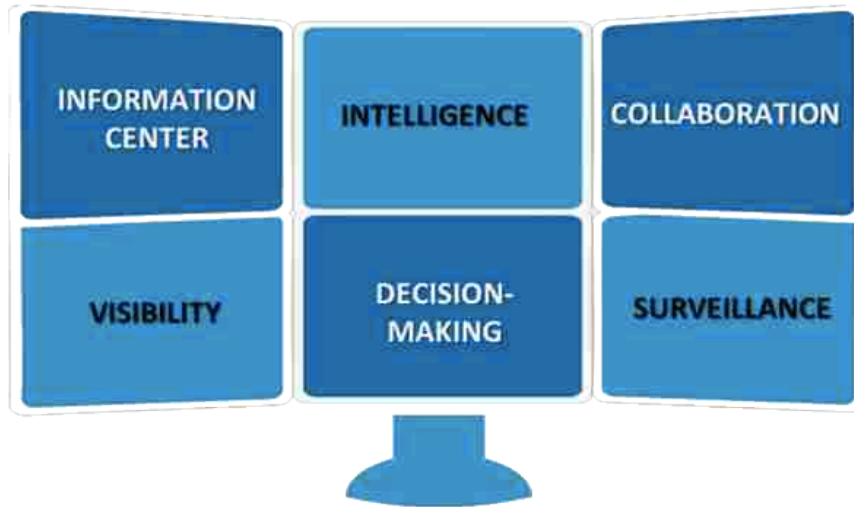
Volume Satuan : 1 Kasus
1 Kasus : Rp 73,250,000

NO	MASUKAN (INPUT)					KETERANGAN
	TAHAPAN PELAKSANAAN DAN RINCIAN KOMPONEN BIAYA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	PERSIAPAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Alat dan Bahan	1	KEG	2,000,000	2,000,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	- Konsumsi Rapat Persiapan	20	OH	60,000	1,200,000	- Sesuai SBM/PSBK
2	PELAKSANAAN					
	521211 Belanja Bahan					
	- Pembelian Bahan Bakar untuk Pemusnahan BB	50	LTR	11,000	550,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya					
	- Uji Lab / Forensik TSL	1	KALI	2,000,000	2,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
	- Pengangkutan dan Bongkar Muat Barang Bukti	1	PKT	3,500,000	3,500,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>

	- Pelelangan Barang Bukti	1	PKT	10,000,000	10,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota					
	- Uang harian Penjagaan dan Pengamanan Barang Bukti (5 org x 20 hari)	100	OH	160,000	16,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i> dan dimungkinkan menggunakan MAK 524113 apabila tidak memenuhi kriteria penggunaan MAK 524111
	- Transportasi petugas	5	OT	1,000,000	5,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
522141	Belanja Sewa					
	- Sewa alat pemusnah barang bukti skala besar	1	PKT	20,000,000	20,000,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
524111	Belanja Perjalanan biasa				-	
	- Transportasi dalam rangka penanganan BB	5	OT	2,500,000	12,500,000	- Diberikan secara <i>at cost</i>
3	PEMBAHASAN dan PENYELESAIAN					
521211	Belanja Bahan					
	- Penggandaan Laporan dan Dokumen	1	Keg	500,000	500,000	- Sesuai kebutuhan dengan prinsip efektif dan efisien
	TOTAL BIAYA				73,250,000	
	VOLUME				1 Kasus	
	INDEKS BIAYA				73,250,000	

Ket : SBM : Standar Biaya Masukan PMK No 33/PMK.02/2016
 Pedoman Standar Biaya Kegiatan Lingkup Kem LHK No
 PSBK : P.8/SETJEN/ROKEU/KEU.1/8/2016

D. Sistem Pendataan dan Pelaporan



Berdasarkan Pasal 1109 huruf f Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditentukan bahwa Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup dan kehutanan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan oleh karena data dan informasi penegakan hukum bersifat dinamis sehingga perlu terus diperbaharui untuk memperoleh data yang mutakhir yang dikelola melalui sistem penyimpanan,

pengolahan dan pengarsipan yang terorganisasi dengan baik.

Sistem Pendataan dan Pelaporan lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendataan dan pelaporan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan layanan penyediaan data dan informasi. Tujuan sistem pendataan dan pelaporan adalah terselenggaranya sistem pendataan dan pelaporan secara terkoordinasi, terintegrasi, efektif dan efisien, lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



Analytics, Information Processing & Presentation



Drone & Surveillance



Intelligent Control Room Platform



Mobility



Security



Social Media Miner



Teleconference & Network



Other Advanced & New Technologies



E. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berdasarkan pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.38/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewajibkan setiap satker pusat maupun satker UPT lingkup Kementerian melalui tahapan penyusunan desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, oleh karena itu ditetapkan tim penyusunan desain penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum melalui Keputusan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan Tim untuk menyusun desain penyelenggaraan SPIP Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan berdasarkan pasal 13, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu satker pusat perlu menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertujuan untuk

1. Memfasilitasi pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK.
2. Melakukan Koordinasi dengan instansi Pembina SPIP.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian intern di Sekretariat Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum LHK.

4. Membantu penyiapan infrastruktur penyelenggaraan SPIP, dalam hal penyusunan design penyelenggaraan SPIP;
5. Melakukan Koordinasi penyusunan SOP pengendalian kegiatan, dan
6. Melaporkan secara berkala hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



Gambar 6 Skema Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan



BAB IV

KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2017, diuraikan pada Tabel. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah. Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.

Tabel 18 Skenario Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK TA 2017

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen uraian	target		Anggaran
		vol	sat	jumlah
029.10.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			235,719,413
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			52,544,687
5427.001	SAKIP Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan Nilai Minimal 78,00 9A) di tahun 2019 [Base Line]	75	Poin	52,544,687
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI				
BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA TEKNIS				
BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA				
BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM				



BAB V

PENUTUP

Dalam menghadapi tantangan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yaitu menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) jangka 5 tahun dan Rencana Kerja jangka 1 tahun secara sistimatis

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2017 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Dengan demikian diharapkan Rencana Kerja Tahun 2017 yang telah disusun dapat memperlancar penyusunan kegiatan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan hidup dan Kehutanan selama Tahun Anggaran 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 19 Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Program dan Evaluasi

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	Anggaran
	uraian	jumlah
SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN		
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan	653.888.000
A	Penyusunan Rencana Kerja Ditjen PHLHK Tahun 2017	
B	Penyusunan Rencana Kerja Setditjen PHLHK Tahun 2017	
C	Rapat Kerja Bidang PHLHK Tahun 2016	
D	Pembahasan Awal RKP Tahun 2018 Ditjen PHLHK	
052	Penyusunan Dokumen Anggaran	1.207.134.000
A	Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK	
B	Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Bidang PHLHK Tahun 2017	
D	Penyusunan Anggaran Bidang PHLHK	
E	Pemantapan Penyusunan RKA-K/L Ditjen PHLHK Tahun 2017	
F	Kelompok Kerja Program dan Anggaran Tahun 2016	
G	Proses Bisnis Penganggaran Ditjen Gakum LHK	
H	Kelompok Kerja PUG	
I	Reviu Anggaran Bidang Penegakan Hukum LHK	
J	Satgasus Penyelesaian Pengawasan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	
TOTAL		



SUB BAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DATA DAN INFORMASI		
053	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan	505.880.000
A	Monitoring Pencapaian Indikator Kinerja dan DIPA Program PHLHK	
B	Penyusunan dan Evaluasi LAKIP PHLHK Tahun 2015	
C	Rakor Evaluasi Kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK	
D	Pemantapan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Pelaksanaan Kegiatan GAKKUM LHK pada Brigade SPORC	
F	Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen GAKUM LHK Tahun 2015	
G	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran Dan Tahunan PHLHK	
H	Penyusunan Laporan Tahunan Setditjen PHLHK Tahun 2016	
054	Penyusunan Data dan Informasi	1.544.120.000
A	Penyusunan Buku Statistik Ditjen PHLHK Tahun 2015	
B	Penyajian Informasi Pembangunan Kehutanan Bidang GAKUM LHK	
C	Penyebarluasan informasi bidang PHLHK	
D	Pameran Penegakan Hukum LHK	
E	Pengelolaan Operasional Room Data Manajemen System Penegakan Hukum	
F	Maintenance Aplikasi dan Publikasi Penegakan Hukum LHK	

Tabel 20 Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Hukum dan Kerjasama Teknis

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	Anggaran
	uraian	jumlah
	SUB BAGIAN KERJASAMA TEKNIS	
055	Kemitraan dan Kerjasama Dalam Negeri	299.050.000
A	Penyusunan kurikulum terkait hukum lingkungan hidup dan kehutanan	
B	Launching Lokakarya dan Pelatihan Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	
056	Penyusunan Kerjasama Luar Negeri	400.200.000
A	Penyelenggaraan Kerjasama Luar Negeri	
	SUB BAGIAN HUKUM	
057	Penyusunan Rancangan Perundang-undangan	600.750.000
B	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	
D	Pendampingan dalam rangka Penyelesaian Kasus LH dan Kehutanan	



Tabel 21 Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	Anggaran
	uraian	jumlah
	SUB BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
058	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	455.310.000
B	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Ditjen PHLHK	
D	Pengembangan dan Editing Sistem Informasi Kepegawaian	
F	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Lingkup PHLHK	
H	Penyusunan Analisis dan Evaluasi Jabatan UPT PHLHK	
	SUB BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	
059	Penyusunan Organisasi Tata Laksana	894.690.000
A	Pembinaan Kelembagaan Lingkup Ditjen PHLHK	
B	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas LH	
C	Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	
060	Penyelenggaraan Pembinaan Staf dan Publik Terkait	848.000.000
A	Pembinaan Aparatur Sipil Negara Ditjen PHLHK	

Tabel 22 Alokasi Anggaran Unit Kegiatan Keuangan dan Umum

BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM		
kode	Indikator Kinerja Kegiatan/Unit Kegiatan/Komponen	Anggaran
	uraian	jumlah
SUB BAGIAN KEUANGAN		
061	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	797.490.000
A	Rekonsiliasi dan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bidang PHLHK Tahun 2015	
B	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016	
C	Koordinasi dan Pembinaan Keuangan Bagian Pelaksana Anggaran Satker	
D	Penyegaran Bendahara Pengeluaran Ditjen PHLHK Tahun 2016	
E	Pembahasan Kegiatan BP/BPP Satker Setditjen Gakum	
F	Rapat koordinasi persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 (Revisi DJPB)	
SUB BAGIAN PERLENGKAPAN		
062	Penyelenggaraan Administrasi Perlengkapan	750.010.000
A	Evaluasi Kebutuhan Sarpras Ditjen Gakum	
B	Pemutakhiran data Barang Milik Negara	
C	Bimtek dan Pembinaan Pengelola BMN	
D	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan terbaru terkait Pengelolaan BMN	
E	Penyusunan Laporan BMN Ditjen Gakum Semester I 2016	
F	Pembakuan Sarana dan Prasarana Kerja	
SUB BAGIAN KETATAUSAHAAN DAN UMUM		
063	Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Umum	954.500.000
A	Penataan Arsip dan Penghapusan Non Arsip Lingkup Setditjen GAKUM	
B	Pengelolaan Surat/ Dokumen Dinas	
C	Layanan Rumah Tangga Pimpinan	
D	Sosialisasi Tata Naskah Dinas Kementerian LHK	



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2017

GEDUNG MANGGALA WANABAKTI BLOK IV LT 4,
JL. GATOT SUBROTO, JAKARTA

